

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALOKASI BELANJA PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ACEH****Fitri Yunina, S.E., M.Si.**

(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh)

Tika Handayani

(Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh)

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, dengan objeknya adalah pengalokasian belanja pendidikan, yang bertujuan untuk diuji faktor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian belanja pendidikan tersebut, dengan faktor yang digunakan adalah dana otonomi khusus, dana alokasi khusus (DAK), dan kinerja keuangan yang dilihat dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa laporan rekapitulasi realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh selama tahun anggaran 2013-2015, dengan teknik analisis datanya menggunakan pengujian regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan baik secara parsial maupun simultan, dana otonomi khusus, DAK dan SiLPA berpengaruh terhadap alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, dengan besarnya pengaruh sebesar 75%.

Kata Kunci : Alokasi Belanja Pendidikan, Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

PENDAHULUAN

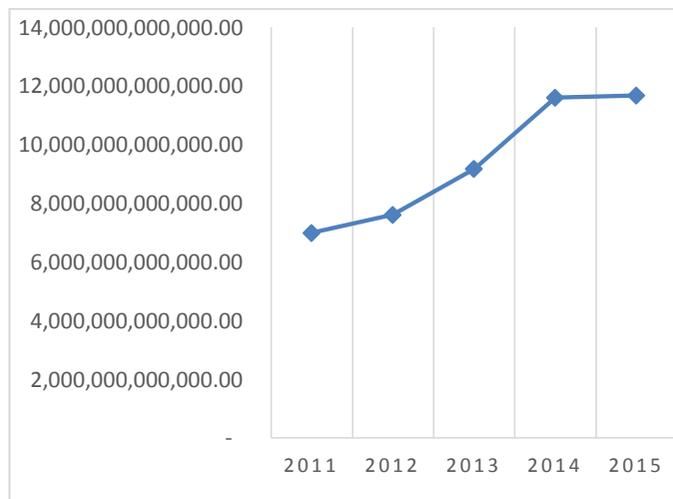
Pendidikan adalah faktor yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat menjamin terselenggaranya pendidikan dengan mutu/kualitas yang baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Bentuk keseriusan Pemerintah dalam bidang pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4, yang mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Meskipun aspek pendidikan merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan, namun dunia pendidikan di Indonesia dinilai masih bermasalah, karena masih dijadikan sebagai komoditi yang mahal. Hanya pihak yang memiliki kemampuan finansial lebih yang mampu mengenyam pendidikan yang berkualitas, sehingga hal ini dapat mengakibatkan tidak sebandingnya mutu pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya (sindonews.com, 2016).

Permasalahan pendidikan di tingkat nasional sebagaimana yang dijelaskan di atas, dapat berimbas terhadap tingkat pendidikan di daerah, seperti di Aceh yang kualitas pendidikannya masih tertinggal dibanding dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Namun di sisi lain, belanja di sektor pendidikan justru semakin meningkat tiap tahun (Serambi Indonesia, 2016). Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang selama tahun 2011-2015

mengalami peningkatan, yang dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.1
APBA Pemerintah Aceh



Sumber: LKPA Pemerintah Aceh (2017)

Gambar di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya APBA Pemerintah Aceh mengalami pertumbuhan, terutama pada tahun 2015 yang pertumbuhannya sangat tinggi mencapai Rp 11.680.376.915.212. Jika mengacu kepada UU No. 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa pengalokasian dana pendidikan minimal 20% dari APBD, maka dana pendidikan di Aceh sungguh sangat besar yang mencapai triliun rupiah. Namun pada kenyataannya, tingkat pendidikan di Aceh masih sangat rendah yang menempati peringkat ke 32 dari 34 provinsi di Indonesia (RRI, 2016). Hal ini merupakan suatu fenomena yang besar, dimana disaat APBA di Aceh merupakan salah satu terbesar di Indonesia karena adanya dana otonomi khusus, namun kinerjanya di bidang pendidikan justru masih sangat rendah.

Berdasarkan sumber data dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pengalokasian Belanja Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2013-2015

No	Tahun	APBA	Alokasi Dana Pendidikan	%
1	2013	Rp 9.180.143.048.437,00	Rp 584.921.568.670,00	6,4%
2	2014	Rp 11.606.324.715.015,00	Rp 907.194.437.735,00	7,8%
3	2015	Rp 11.680.376.915.212,00	Rp 754.904.011.405,00	6,5%

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Aceh (2017)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui pengalokasian belanja pendidikan pada Pemerintah Aceh selama tahun anggaran 2013-2015 masih sangat rendah, yaitu rata-rata di bawah 10%. Padahal jika mengacu kepada UU Nomor 20 tahun 2003, minimal pengalokasian dana pendidikan adalah sebesar 20% dari total APBN pada tingkat negara ataupun APBD pada tingkat daerah. Hal ini merupakan suatu permasalahan, dimana disaat APBA Pemerintah Aceh selama tahun 2013-2015 mengalami peningkatan, justru pengalokasian dana pendidikannya mengalami penurunan seperti yang terjadi pada tahun 2015.

Pada dasarnya pengalokasian dana pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh sangat ditentukan oleh besarnya APBA yang diperoleh Pemerintah Aceh pada suatu tahun anggaran, terutama APBA yang bersumber dari dana otonomi khusus, karena pendanaan bidang pendidikan merupakan salah satu prioritas pengalokasian dana otonomi khusus sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 29 ayat (1) Qanun Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh. Kemudian pengalokasian dana pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh juga sangat ditentukan oleh dana alokasi khusus, yang merupakan dana dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan

prioritas nasional. Urusan bagian pendidikan merupakan salah satu prioritas nasional dan menjadi urusan wajib bagi setiap Pemerintah Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang APBN. Pengalokasian dana pendidikan juga sangat ditentukan oleh kinerja instansi yang mengelola dana tersebut, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Hal ini dikarenakan berdasarkan prinsip penganggaran daerah, setiap instansi harus menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam penjabaran APBD dengan mengacu kepada kinerja pada tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian terkait dengan pengalokasian belanja pendidikan di Aceh, dengan rumusan masalahnya yaitu:

1. Apakah dana otonomi khusus, dana alokasi khusus (DAK) dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) secara simultan mempengaruhi alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Apakah dana otonomi khusus secara parsial mempengaruhi alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
3. Apakah dana alokasi khusus (DAK) secara parsial mempengaruhi alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
4. Apakah sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) secara parsial mempengaruhi alokasi

belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Belanja Pendidikan

Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2014, belanja pendidikan merupakan belanja daerah yang termasuk ke dalam kategori belanja berdasarkan urusan wajib. Belanja pendidikan termasuk belanja daerah yang mendapat prioritas untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan termasuk kategori belanja berdasarkan urusan wajib yang fungsinya untuk penyelenggaraan pendidikan. Pada Pemerintah Aceh, belanja pendidikan merupakan belanja yang mendapat prioritas tertinggi dibandingkan dengan belanja lainnya. Hal ini tercermin dari urutan klasifikasi belanja menurut urusan wajib Pemerintah Aceh, dimana belanja pendidikan menempati urutan pertama dibandingkan dengan urusan wajib belanja lainnya (Qanun Nomo 10 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh).

Dana Otonomi Khusus

Soemokil (2011), mendefinisikan otonomi khusus adalah hak untuk menentukan nasib sendiri yang diperoleh suatu wilayah berpemerintah sendiri (*internal self government*), sebagai pengakuan kemerdekaan parsial dari pengaruh pemerintah pusat. Menurut Huda (2014:109), otonomi khusus adalah kebebasan (kewenangan) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa otonomi khusus merupakan suatu kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengurus atau

mengatur sendiri daerahnya yang dilimpahkan dari kewenangan pusat.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Menurut Yani (2013:165), DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dari ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan tertentu yang bersifat khusus dengan prioritas nasional. Adisasmita (2014:183), merincikan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan khusus dan prioritas nasional yaitu:

1. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, misalnya
 - a. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain
 - b. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain
 - c. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir yang tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai
 - d. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.
2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional, yang meliputi:
 - a. Kebutuhan yang sesuai dengan kegiatan yang menjadi komitmen pemerintah dengan lembaga donor
 - b. Kebutuhan yang sesuai dengan kegiatan yang menjadi prioritas dalam rencana pembangunan tahunan.

Kinerja Keuangan

Menurut Darmayanti dkk (2016), mengukur dan mengevaluasi hasil dari kinerja keuangan daerah bisa dilihat pada daya serap anggaran masa lalu yang tergambar pada besaran sisa anggaran pada akhir tahun atau yang sering disebut dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Jika kondisinya SiLPA besar, maka kinerja pemerintah daerah tidak bagus karena menunjukkan ketidakselarasan dalam perencanaan/penganggaran.

Menurut Permendagri Nomor 21 tahun 2011, SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA pada dasarnya merupakan suatu indikator yang dapat menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. Hal ini dikarenakan SiLPA hanya akan terbentuk jika terjadi surplus pada APBD dan sekaligus menjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Darmayanti, dkk, 2016).

Kerangka Pemikiran

1. Hubungan Dana Otonomi Khusus Dengan Belanja Pendidikan

Dana otonomi khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan (UUPA No.11 Tahun 2006). Sebagai salah satu sumber dana yang ditujukan untuk pendanaan pendidikan, maka dana otonomi khusus memiliki hubungan dengan pengalokasian belanja pendidikan di Aceh, yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Maka dari itu, dana otsus mempengaruhi pengalokasian belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh.

2. Hubungan Dana Alokasi Khusus Dengan Belanja Pendidikan

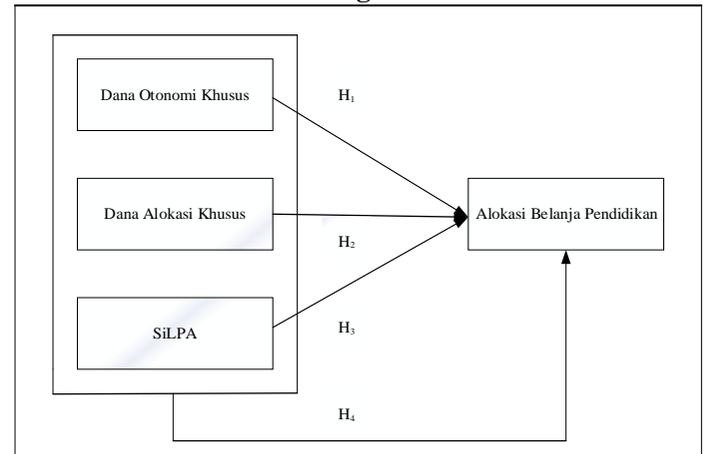
Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Yani, 2013:165). Menurut Kaharuddin (2013), salah satu bentuk dari kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional adalah urusan di bidang pendidikan, sehingga pengalokasian DAK sangat menentukan atau mempengaruhi besarnya pengalokasian belanja pendidikan di Dinas Pendidikan Aceh.

3. Hubungan Kinerja Keuangan Dengan Belanja Pendidikan

Menurut Darmayanti dkk (2016), mengukur dan mengevaluasi hasil dari kinerja keuangan daerah bisa dilihat pada daya serap anggaran masa lalu yang tergambar pada besaran sisa anggaran pada akhir tahun atau yang sering disebut dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). SiLPA merupakan selisih dari penerimaan dengan pengeluaran anggaran, dimana jika penerimaan anggaran lebih besar dari pengeluaran anggaran mengindikasikan bahwa penyerapan anggarannya masih belum optimal, sehingga mencerminkan ketidakmampuan kinerja keuangan suatu instansi dalam melakukan penyerapan anggaran. SiLPA berkaitan dengan pengelolaan belanja daerah, hubungannya dengan belanja pendidikan adalah belanja pendidikan merupakan bagian dari belanja daerah.

Untuk lebih mudah memahami tentang kerangka pemikiran dalam penelitian ini, berikut disajikan gambar skema kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Aceh yang beralamat di Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No.22 Banda Aceh. Objek penelitian ini adalah pengalokasian belanja pendidikan pada dinas tersebut, untuk diteliti faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang berupa laporan rekapitulasi realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh selama tahun anggaran 2013-2015, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Study Kepustakaan (*Library Research*), dengan cara mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dengan objek penelitian, yaitu dengan cara mempelajari dan mengkaji *literature* seperti buku dan jurnal akuntansi serta dari berbagai situs pendukung lainnya.
2. Teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari dan menganalisa dokumen-dokumen dan laporan mengenai data yang berhubungan dengan penelitian

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda, dengan persamaannya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan untuk variabel-variabel pada persamaan di atas yaitu:

- Y = Alokasi belanja pendidikan
- X₁ = Dana otonomi khusus
- X₂ = Dana alokasi khusus
- X₃ = Kinerja Keuangan
- α = Konstanta
- β₁ β₂ β₃ = Koefisien regresi
- ε = Kesalahan Estimasi

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Pengalokasian Belanja Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh Tahun 2013-2015

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwasanya pengalokasian belanja pendidikan minimal adalah 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun berbeda dengan yang terjadi pada Pemerintah Aceh, dimana pengalokasian belanja pendidikannya yang secara berkompoten dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Aceh masih belum mencapai 20%, sedangkan ditinjau dari APBA Pemerintah Aceh selalu menunjukkan pertumbuhan yang signifikan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Persentase Pengalokasian Belanja Pendidikan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2013-2015

Disajikan Dalam Rupiah Penuh				
No	Tahun	APBA	Alokasi Dana Pendidikan Pemerintah Aceh	%
1	2013	Rp 9.180.143.048.437,00	Rp 584.921.568.670,00	6,4%
2	2014	Rp 11.606.324.715.015,00	Rp 907.194.437.735,00	7,8%
3	2015	Rp 11.680.376.915.212,00	Rp 754.904.011.405,00	6,5%
Rata-Rata		Rp 10.822.281.559.554,70	Rp 749.006.672.603,33	6,9%

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Aceh (2017)

Tabel di atas menunjukkan besarnya pengalokasian dana pendidikan pada Pemerintah Aceh selama tahun 2013-2015 rata-rata sebesar Rp 749.006.672.603,33 atau 6,9% dari total APBA Pemerintah Aceh, dengan pengalokasian terbesar sebesar 7,8% yang dialokasikan pada tahun 2014, dan pengalokasian terendah sebesar 6,4% yang dialokasikan pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian dana pendidikan pada Pemerintah Aceh masih belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, dimana yang seharusnya pengalokasian minimalnya adalah sebesar 20%, namun pengalokasian yang sebenarnya rata-rata masih di bawah 10%.

Gambaran Umum Penerimaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun 2013-2015

Provinsi Aceh merupakan satu dari keempat Provinsi lainnya di Indonesia yang dianggap memiliki Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus, sehingga Pemerintah Pusat mengalokasikan sejumlah anggarannya kepada keempat provinsi tersebut dalam bentuk dana otonomi khusus dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan daerahnya. Keempat provinsi yang dimaksudkan meliputi Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi

Papua Barat. Dengan disandangnya status otonomi khusus oleh Provinsi Aceh, tentunya penerimaan anggaran pendapatannya juga semakin besar, karena adanya tambahan dana otonomi khusus yang memiliki porsi terbesar dalam struktur APBA Pemerintah Aceh yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2

Persentase Penerimaan Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2013-2015

Disajikan Dalam Rupiah Penuh				
No	Tahun	APBA	Dana Otonomi Khusus	Persentase
1	2013	Rp 9.180.143.048.437	Rp 5.476.288.764.000	59,7%
2	2014	Rp 11.606.324.715.015	Rp 6.824.386.514.000	58,8%
3	2015	Rp 11.680.376.915.212	Rp 7.057.756.971.000	60,4%

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Aceh (2017)

Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi dana otonomi khusus terhadap APBA Pemerintah Aceh selama tahun anggaran 2013-2015 sangat dominan, dimana jumlah terbesarnya mencapai 60,4% dari total APBA tahun 2015, dan jumlah terendahnya sebesar 58,8% dari total APBA tahun 2014 yang mengalami penurunan kontribusi sebesar 0,9% dari tahun 2013.

Gambaran Umum Penerimaan Dana Alokasi Khusus Provinsi Aceh Tahun 2013-2015

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang APBN, urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, diantaranya meliputi pengembangan infrastruktur daerah, dan pengembangan kegiatan reguler lainnya seperti bidang pendidikan, kesehatan, kelautan,

infrastruktur perumahan, dan lain sebagainya. DAK yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah termasuk ke dalam kategori dana perimbangan, yang meliputi penerimaan DAK, dana alokasi umum (DAU), dan dana bagi hasil (DBH). Penerimaan DAK Pemerintah Aceh selama tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3

Persentase Penerimaan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2013-2015

Disajikan Dalam Rupiah Penuh					
No	Tahun	APBA	Dana Alokasi Khusus	Persentase	
1	2013	Rp 9.180.143.048.437,00	Rp 50.413.710.000,00	0,5%	
2	2014	Rp 11.606.324.715.015,00	Rp 72.953.790.000,00	0,6%	
3	2015	Rp 11.680.376.915.212,00	Rp 70.866.056.000,00	0,6%	
Rata-Rata		Rp 10.822.281.559.554,70	Rp 64.744.518.666,67	0,6%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi DAK terhadap APBA Pemerintah Aceh selama tahun anggaran 2013-2015 relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan-penerimaan Pemerintah Aceh lainnya, seperti dana otonomi khusus. Kontribusinya DAK terhadap APBA rata-rata sebesar 0,6% setiap tahunnya, dengan kontribusi terendahnya sebesar 0,5% pada tahun 2013, dan 0,6% pada tahun 2014 dan tahun 2015.

Gambaran Umum Kinerja Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh Tahun 2013-2015

Mengukur dan mengevaluasi hasil dari kinerja keuangan daerah bisa dilihat dari daya serap anggaran masa lalu yang tergambar pada besaran sisa anggaran pada akhir tahun atau yang sering disebut dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Jika kondisinya SiLPA besar, maka kinerja pemerintah daerah tidak bagus karena menunjukkan ketidaksielarasan dalam perencanaan/penganggaran. Gambaran umum terkait kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Aceh

yang tergambar dalam SiLPA selama tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4
SiLPA Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
Tahun Anggaran 2013-2015

Disajikan Dalam Rupiah Penuh				
No	Tahun	Target B. Pendidikan	Realisasi B. Pendidikan	SiLPA
1	2013	Rp 584.921.568.670,00	Rp 495.681.985.621,00	15,3%
2	2014	Rp 907.194.437.735,00	Rp 741.119.984.704,00	18,3%
3	2015	Rp 754.904.011.405,00	Rp 660.430.244.912,00	12,5%
Rata-Rata		Rp 749.006.672.603,33	Rp 632.410.738.412,33	15,6%

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Aceh (2017)

Tabel di atas menunjukkan SiLPA Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dalam mengelola anggaran belanjanya relatif masih besar, dimana rata-rata sebesar 15,6% pertahun, dengan SiLPA terbesar pada tahun 2014 sebesar 18,3%, dan SiLPA terendah pada tahun 2015 sebesar 12,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Aceh masih belum efektif dalam menyerap anggaran belanjanya, sehingga dikhawatirkan telah terjadi beberapa pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan namun tidak bisa dijalankan atau direalisasikan.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Berikut hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini.

Tabel 4.5
Statistik Deskriptif

No	Keterangan	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
1	Alokasi Belanja Pendidikan	3	0,064	0,078	0,0690	0,0078
2	Dana Otonomi Khusus	3	0,588	0,604	0,5963	0,0080
3	Dana Alokasi Khusus	3	0,005	0,006	0,0057	0,0005
4	Kinerj Keuangan	3	0,125	0,183	0,1537	0,0290

Sumber: Output SPSS (2017)

Tabel di atas menunjukkan deskripsi atau gambaran masing-masing variabel yang digunakan, dimana variabel alokasi belanja pendidikan minimal sebesar 6,4% yang terdapat pada tahun 2013, dan alokasi terbesarnya sebesar 7,8% yang terdapat pada tahun 2015. Rata-rata alokasi belanja pendidikan sebesar 6,9% dengan kecenderungan perubahan datanya sebesar 0,78% (standar deviasi). Kemudian variabel dana otonomi khusus, dengan nilai terkecilnya sebesar 58,8% yang terdapat pada tahun 2014, dan nilai terbesarnya sebesar 60,4% yang terdapat pada tahun 2015. Rata-rata nilai variabel data otonomi khusus sebesar 59,63% dengan kecenderungan perubahannya sebesar 0,08%.

Selanjutnya variabel dana alokasi khusus memiliki nilai terkecil sebesar 0,05% yang terdapat pada tahun 2013, dan nilai terbesarnya sebesar 0,06% yang terdapat pada tahun 2014 sebesar 0,06%. Rata-rata nilai variabel data alokasi khusus sebesar 0,057% dengan kecenderungan perubahannya sebesar 0,005%. Berikutnya variabel terakhir yaitu kinerja keuangan, nilai terendahnya sebesar 12,5% yang terdapat pada tahun 2015, dan nilai tertinggi sebesar 18,3% yang terdapat pada tahun 2015. Rata-rata nilai variabel kinerja keuangan sebesar 15,37% dengan kecenderungan perubahannya sebesar 2,9%.

Pengujian Regresi Linear

Pengujian regresi linear bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu dana otonomi khusus (X_1), dana alokasi khusus (X_2), dan kinerja keuangan (X_3) terhadap alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh (Y). Dikarenakan penelitian ini menggunakan variabel independen lebih dari satu, maka model regresi yang digunakan adalah regresi linear berganda, dengan hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6
Pengujian Regresi Linear

No	Keterangan	Unstandardized Coefficients		Koefisien Korelasi	Koefisien Determinasi
		B	Std. Error		
1	Konstanta	0,007	0,641	0,866	0,750
2	Dana Otonomi Khusus	0,104	0,032		
3	Dana Alokasi Khusus	7,268	1,403		
4	Kinerja Keuangan	0,221	0,196		

Sumber: Output SPSS (2017)

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi linear yang dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = 0,007 + 0,104x_1 + 7,268x_2 - 0,221x_3 + e$$

Persamaan regresi linear di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) sebesar 0,007. Artinya jika tidak ada dana otonomi khusus, dana alokasi khusus, dan kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, maka besarnya pengalokasian dana pendidikan pada Pemerintah Aceh hanya sebesar 0,007%
2. Nilai koefisien regresi variabel dana otonomi khusus (X_1) sebesar 0,104. Artinya setiap peningkatan penerimaan dana otonomi khusus oleh Pemerintah Aceh, maka pengalokasian belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh juga meningkat sebesar 0,104%

3. Nilai koefisien regresi variabel dana alokasi khusus (X_2) sebesar 7,268. Artinya setiap peningkatan penerimaan dana alokasi khusus oleh Pemerintah Aceh, maka pengalokasian belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh juga meningkat sebesar 7,268%
4. Nilai koefisien regresi variabel kinerja keuangan (X_3) sebesar 0,221. Artinya setiap peningkatan kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, maka pengalokasian belanja pendidikan pada Pemerintah Aceh juga meningkat sebesar 0,221%.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Pengujian hipotesis secara parsial bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen secara sendiri (parsial) terhadap variabel dependen, dengan kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis secara parsial, yaitu:

- Apabila $\beta = 0$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- Apabila $\beta \neq 0$, maka H_0 ditolak, H_a diterima

H_1 : $\beta_1 = 0,104$, dimana nilai tersebut tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$). Maka H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak, artinya secara parsial dana otonomi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh

H_2 : $\beta_2 = 7,268$, dimana nilai tersebut tidak sama dengan nol ($\beta_2 \neq 0$). Maka H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak, artinya secara parsial dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh

H_3 : $\beta_3 = 0,221$, dimana nilai tersebut tidak sama dengan nol ($\beta_3 \neq 0$). Maka H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak, artinya secara parsial kinerja

keuangan (SiLPA) berpengaruh terhadap alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh.

Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Pengujian hipotesis secara simultan bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen, dengan kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis secara parsial, yaitu:

- Apabila $\beta_i (i=1,2,3) = 0$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- Apabila $\beta_i (i=1,2,3) \neq 0$, maka H_0 ditolak, H_a diterima

H_4 : $\beta_1 = 0,104$, $\beta_2 = 7,268$, $\beta_3 = 0,221$, maka $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \neq 0$. Dengan demikian H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima, artinya secara simultan dana otonomi khusus, DAK dan SiLPA berpengaruh terhadap alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh

PEMBAHASAN

Pengaruh Dana Otonomi Khusus, DAK dan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil pengujian statistik, ketiga koefisien regresi dari variabel independen tidak sama dengan nol ($\beta_1 \beta_2 \beta_3 \neq 0$). Hal ini berarti bahwa model yang digunakan signifikan atau setiap variabel independen, baik secara simultan maupun parsial mempunyai pengaruh terhadap alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh.

Selain ketiga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, hubungan antar variabel dalam penelitian ini juga sangat besar, yang dibuktikan dengan nilai koefisien korelasinya

sebesar 0,866 yang dapat dilihat pada tabel 4.7. Artinya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 86,6%. Kemudian untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, maka dapat dilihat nilai koefisien determinasinya yaitu sebesar 0,750. Artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 75%, sedangkan sisanya sebesar 25% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, seperti faktor perencanaan, kompetensi sumber daya manusia, dan lain sebagainya.

Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil pengujian statistik, variabel dana otonomi khusus berpengaruh positif terhadap alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, dimana semakin meningkatnya penerimaan dana otonomi khusus pada Pemerintah Aceh, maka pengalokasian belanja pendidikannya juga semakin meningkat. Namun pengaruh dari dana otonomi khusus masih sangat rendah terhadap pengalokasian belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, yaitu hanya sebesar 0,104%.

Berpengaruhnya dana otonomi khusus terhadap pengalokasian belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, dikarenakan Dana otonomi khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan (UUPA No.11 Tahun 2006). Sebagai salah satu sumber dana yang ditujukan untuk pendanaan pendidikan, maka sudah

seharusnya dana otonomi khusus tersebut berpengaruh terhadap pengalokasian belanja pendidikan di Aceh.

Namun terkait dengan masih rendahnya pengaruh dari dana otonomi khusus terhadap pengalokasian belanja pendidikan di Aceh, dikarenakan oleh setiap tahunnya penerimaan dana otonomi khusus Pemerintah Aceh selalu meningkat, namun belanja sektor pendidikannya justru menurun. Hal ini menunjukkan kedua aspek tersebut tidak konsisten atau tidak ekuivalen, padahal yang seharusnya disaat penerimaan dana otonomi khusus meningkat, maka pengalokasian belanja pendidikannya juga harus meningkat.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil pengujian statistik, variabel dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, dimana semakin meningkatnya penerimaan DAK pada Pemerintah Aceh, maka pengalokasian belanja pendidikannya juga semakin meningkat, dengan besarnya pengaruh sebesar 7,268%, dimana pengaruh tersebut lebih besar dibandingkan dengan pengaruh dari dana otonomi khusus terhadap pengalokasian belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh.

Berpengaruhnya DAK terhadap pengalokasian belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, dikarenakan DAK merupakan dana bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Kaharuddin (2013), salah satu bentuk dari kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional adalah urusan di

bidang pendidikan, sehingga salah satu tujuan dialokasikannya DAK adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada suatu daerah. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang APBN, bahwa pengalokasian dana pendidikan merupakan salah satu bentuk dari DAK untuk kegiatan reguler.

Pengaruh SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil pengujian statistik, variabel kinerja keuangan yang dilihat dari aspek sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, dimana semakin meningkatnya kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, maka pengalokasian dana pendidikannya juga akan semakin meningkat, dengan besarnya pengaruh sebesar 0,221%.

Berpengaruhnya SiLPA terhadap pengalokasian belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, dikarenakan SiLPA menunjukkan kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, sehingga semakin baik kinerja keuangannya, maka penyerapan anggarannya juga semakin baik, dan pendanaan terhadap program/kegiatan yang telah direncanakan juga semakin baik. Dengan demikian pengalokasian dananya juga akan meningkat.

KESIMPULAN, KELEMAHAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, maka penulis dapat menyimpulkan yaitu:

1. Dana otonomi khusus, dana alokasi khusus (DAK) dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) secara simultan berpengaruh terhadap alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, dengan besarnya pengaruh sebesar 75%
2. Dana otonomi khusus secara parsial berpengaruh terhadap alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
3. Dana alokasi khusus (DAK) secara parsial berpengaruh terhadap alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
4. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) secara parsial berpengaruh terhadap alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh.

Kelemahan

Beberapa kelemahan dari penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan akan adanya perbedaan hasil penelitian apabila dilakukan pada tempat yang berbeda, dan
2. Penelitian ini hanya menggunakan faktor-faktor yang bersumber dari aspek keuangannya saja, sehingga tidak menutup kemungkinan akan adanya perbedaan hasil penelitian apabila ditambahkan faktor-faktor non keuangan lainnya.

Saran

Berdasarkan keterbatasan dari penelitian ini, maka peneliti dapat menyarankan beberapa saran, diantaranya yaitu:

1. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menindak lanjuti hasil dari penelitian ini, dengan melakukan penelitian lain pada objek dan tempat yang lebih luas, dan
2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menambahkan faktor-faktor yang bersifat non keuangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo (2014). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Graha Ilmu
- Darmayanti, Cici dkk (2016) “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Kesehatan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.” *Jurnal Kebangsaan*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. ISSN: 2089-5917. Vol.5, No.9, Januari 2016
- Febriana, Imas Sherli (2015) “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Timur”. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya. Vol. 4 No.9 (2015)
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (SAP Berbasis Akrual)* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat
- Huda, Ni'matul (2014). *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian Terhadap Daerah Istimewa Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*. Jakarta: Nusa Media
- Kaharuddin (2013) “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Belanja Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010”. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, Vol.24, No.1, April 2013.
- Mahmudi (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Nuralam (2011). *Kesejahteraan yang Tersandera: Implementasi Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Khusus*. Jakarta: Grasindo

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri
- Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP) (2012). *Buku Panduan Analisis Belanja Publik Aceh*. Banda Aceh: CPDA.
- Qanun Nomor 1 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Keuangan Aceh. Banda Aceh: Sekretariat Pemerintah Aceh
- Qanun Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 1 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Keuangan Aceh. Banda Aceh: Sekretariat Pemerintah Aceh
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Banda Aceh: Sekretariat Pemerintah Aceh
- Qanun Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Banda Aceh: Sekretariat Pemerintah Aceh
- Radio Republik Indonesia (2016). *“Pendidikan Aceh Terpuruk di Peringkat 32 Nasional”*. <http://rri.co.id/>. Diakses 25 November 2016.
- Sanggalorang, Septiana dkk (2015) “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Universitas Sam Ratulangi, Manado. Vol. 15 no. 02 - Edisi Juli 2015.
- Serambi Indonesia (2016). *“Rapor Merah Pendidikan di Aceh”*. <http://aceh.tribunnews.com/>. Diakses 25 November 2016.
- Sindonews (2016). *“Masalah Pendidikan yang Tak Pernah Tuntas”*. <http://nasional.sindonews.com/>. Diakses 25 November 2016.
- Soemokil, David (2011). Otonomi Khusus Provinsi Papua Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Naskah Publikasi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sugiyono (2012). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta : Alfabeta.
- Suwarno, yogi (2013). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Ulum, Ihyaul, M.D (2012). *Audit Sektor Publik (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jakarta: Sekretariat Negara
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.